KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Risiko manuver Tiga Periode
Tanggal : Sabtu, 02 April 2022
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : -

10 Amazing Tips To Manage Week From Home With Kids Beautifully
Top 7 Countries Opportunities

BERITA UTAMA

Risiko Manuver Tiga Periode

Pemaksaan agenda Jokowi tiga periode bakal memarahkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja presiden. Jika terlaksana, tak ada jaminan masyarakat akan kembali memilih Jokowi.

KAMIS, 2 APRIL 2022

MAYA AYU PUSPITASARI

Presiden Joko Widodo didampingi Menko Marifes I Ket Dirjen Pendjitan mengkadili Mekarakat Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Tahun 2022-2 di Istana Negara, Jakarta, 29 Maret 2022. setkabinet.go.id

- Agenda Jokowi tiga periode telah menggerus tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Presiden Jokowi.
- Masa jabatan Jokowi yang bertambah akibat penundaan Pemilu 2024 bisa dianggap tak memiliki legitimasi.
- Mulai muncul kejenuhan masyarakat atas kinerja Presiden Jokowi.

JAKARTA – Agenda perpanjangan masa jabatan presiden ataupun Jokowi tiga periode telah menggerus tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dua agenda itu tidak hanya berdampak menurunnya tingkat kepuasan publik, tapi diduga berimbas pada melemahnya kepercayaan masyarakat kepada Jokowi maupun elite partai yang mendukung usul tersebut.

"Agenda itu akan berdampak ketidakpercayaan masyarakat pada kredibilitas pemerintah, pejabat publik, dan pemimpin partai politik," kata Titi Anggraini, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jumat, 1 April 2022.

PERMASALAHAN DIBALIK WACANA JABATAN PRESIDEN TIGA PERIODE

Ia berpendapat, agenda perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi maupun Jokowi tiga periode mulai memicu antipati masyarakat kepada pemerintah ataupun partai politik pengusung rencana tersebut. Antipati publik itu bisa berlanjut pada pengabaian keberadaan partai politik peyoleh kedua agenda tersebut. "Sikap itu mengperbiarak citra partai dan elite. Selain menang kontraproduktif mesjaga upaya stabilitas, publik juga tosa makin abai," kata dia.

Menurut Titi, perlawanan publik akan menggelora ketika partai pemerintah dan pejabat di lingkaran pemerintah tetap memaksakan ketha agenda tersebut. Ia mencontohkan saat pemerintah dan sebuah anggota Dewan Perwakilan Rakyat memaksakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja. Publik lantas berbiji-in-diyun berdemonstrasi untuk mendakanya.

Ia memperdiksi perlawanan publik terhadap agenda perpanjangan masa jabatan presiden maupun Jokowi tiga periode akan lebih besar ketimbang publik melawan terhadap revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja, karena menyangkut jeu fundamental. Apalagi beberapa anggota pemerintah dini barisan pendukung Jokowi di pemilu lalu ikut menentangagenda tersebut.

"Dalam isu KPK, kekuatan politik satu suara. Dari kalau agenda Jokowi tiga periode) ini, kelompok politik tidak satu suara. Kita ia ada dinamika politik, bisa menimbulkan kendik horizontal," katanya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, mengatakan pendapat Titi. Ia mengatakan kepercayaan publik kepada partai pendukung agenda Jokowi tiga periode akan merosot. Sebaliknya, kepercayaan publik kepada partai yang menolak agenda tersebut akan meningkat.

"Dapi kalau partai yang menolak agenda itu tidak berhasil mempertahankan Pemilu 2024 tetap ada, regenerasi pemimpin tetap ada, mereka juga akan berlimpah," kata Dedi.

Dedi menjelaskan, kekacauan bahkan kudeta politik berpeluang terjadi ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat akhirnya menyetujui penundaan Pemilu 2024. Sebab, masa jabatan Jokowi yang bertambah akibat penundaan pemilu dianggap tak memiliki legitimasi dan mandat dalam mengakankan pemerintahan.

Ia berpendapat, gerakan pendukung Jokowi tiga periode ini tak terbukti berasal dari keinginan masyarakat. Dukungan terhadap agenda itu muncul lewat kelompok terorganisasi. Misalnya, kata dia, dukungan Jokowi tiga periode yang digunakan dalam acara silaturahmi nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Selasa lalu. "Pengkondisian semacam ini secara moral politik jelas melanggar," ujarnya.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai agenda Jokowi tiga periode sesungguhnya membuat masyarakat semakin jenghel. Ia juga melihat pendukung agenda tersebut terlalu percaya diri karena meraup tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi cukup tinggi.

"Padahal rata-rata mulai muncul rasa ketidakpuasan yang signifikan terhadap pemerintah," kata Adi.

Ia justru melihat tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi makin merosot belakangan ini. Penurunan tingkat kepercayaan ini akibat akumulasi banyak faktor, dari lesbangkan minyak goreng, lonjakan harga bahan bakar minyak, pergantian ibu kota negara dan bengkangnya investor proyek ini, serta agenda Jokowi tiga periode.

Menurut Adi, meski MPR menerima usulan Jokowi tiga periode lewat amendemen UUD 1945, publik belum tentu bersedia memilih kembali Jokowi dalam pemilihan presiden mendatang. Ia justru melihat ada kejenuhan atas kinerja Presiden Jokowi. Indikatornya, mulai bermunculan kritik terhadap pemerintah dari barisan pendukung Jokowi.

Dosen ilmu politik dan internasional Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menyebut manuver terbaru pendukung agenda Jokowi tiga periode mengintikasikan bahwa otak pelaku dan aktor operasi politik rencana ini sudah mengerahkan segala cara. Ia merujuk pada mobilisasi dukungan dari para kepala desa. Selasa lalu.

Dia mendai mobilisasi itu menjadi bukti bahwa strategi pendukung Jokowi tiga periode terdahulu sudah gagal. Strategi itu, misalnya, klaim mendapat restu presiden, hasil survei tingkat kepuasan atas kinerja Jokowi, hingga dukungan data jumbo sebesar 110 juta orang.

Umam juga menyarangkan sikap Jokowi yang terbesan membiarkan agenda itu tetap menggelinding. Bahkan Jokowi justru mengganggap bahwa aspirasi tersebut merupakan bagian dari demokrasi serta dirinya menyatakan akan taat pada konstitusi.

Menurut Umam, pilihan kata Presiden Jokowi tersebut memberi kesan adanya permainan diksi agar tetap terbuka ruang manuver politik. Diksi taat konstitusi dianggap setiapa dengan pernyataan Presiden Soeharto saat hendak mengperpanjang masa jabatanya dengan mengatakan akan taat pada putusan MPR—ketika itu pemilihan presiden masih lewat MPR.

"Artinya, statemen Jokowi itu jelas bersayap. Tidak ada indikasi keinginan politik dari Presiden Jokowi untuk secara lebih tegas dan lebih pasti menolak wacana (Jokowi tiga periode) tersebut," ujar Umam.

MAYA AYU PUSPITASARI

Jokowi #Pemilu 2024 #Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi Tiga Periode